



RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN
2024



**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

KABUPATEN TOBA



SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah

Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Toba.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan,

melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah

BAB II

RUANG LINGKUP RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
- (2) Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

BAB III

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- 1) Sistematika Renja Perangkat Daerah adalah :
Bab I Pendahuluan;
Bab II Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V Penutup
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2024.

Pasal 5

Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- a. mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah; dan
- b. program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

BAB V

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
 1. penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 2. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 3. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 4. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang mencakup :
 1. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 2. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
- c. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi :
 1. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 2. verifikasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang meliputi penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

BAB VI

PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas-Dinas :
 - a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pertanian;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Badan-Badan :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
6. Kecamatan :
 - a. Kecamatan Tampahan;
 - b. Kecamatan Balige;
 - c. Kecamatan Laguboti;
 - d. Kecamatan Sigumpar;
 - e. Kecamatan Silaen;
 - g. Kecamatan Siantar Narumonda;
 - h. Kecamatan Porsea;
 - i. Kecamatan Uluan;
 - j. Kecamatan Bonatua Lunasi;
 - k. Kecamatan Parmaksian;
 - l. Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
 - m. Kecamatan Lumban Julu;
 - n. Kecamatan Ajibata;

- o. Kecamatan Habinsaran;
- p. Kecamatan Borbor;
- f. Kecamatan Nassau.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 5 Juli 2023
BUPATI TOBA

Cap/Dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
Pada tanggal 5 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/Dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2023 NOMOR
31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA

Cap/Dto

ANTHONY SIANIPAR, SH
PEMBINA
NIP. 19671217 200604 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 sebagai bagian dari substansi perencanaan dan sinkronisasi dari perencanaan strategis Kabupaten Toba.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan Dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya Renja ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024, semoga bermanfaat bagi pihak pihak yang memerlukan.

Balige,

2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA**

HARIANTO H. BUTAR BUTAR, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19780118 200502 1 001

DAFTAR ISI

		Hal
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	13
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	23
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	23
3.3	Program dan Kegiatan	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	27
4.1	Program dan Kegiatan	27
BAB V	PENUTUP	41
LAMPIRAN		42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan renja ini juga merupakan rangkaian dari tahap penyusunan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024.

Program pembangunan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian program pembangunan daerah yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang perlu dilaksanakan. rencana kerja menggambarkan tujuan, sasaran, indikator capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan mewujudkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja mendukung pencapaian Visi Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”**.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klarifikasi , kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 -2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud memberikan arah dan tujuan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba, sehingga mampu memprediksi perubahan- perubahan melalui pengkoordinasian dan kemitraan dengan segenap komponen masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba pada tahun yang akan

datang khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lainnya, perlindungan masyarakat dan juga pemadam kebakaran.

Selanjutnya Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan serta perkembangan guna pencapaian tujuan sesuai visi dan misi yang sudah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3. Isu-isu Penting Pelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain rencana kerja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2022 merupakan review pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan terhadap target kinerja secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai indikator yang ditetapkan. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

Berikut Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi, tidak memenuhi dan melebihi target indikator yang sudah

ditetapkan:

I. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kota, dengan indikator persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam kabupaten sebesar 95,91%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator cakupan layanan administrasi keuangan sebesar 98.93 %; kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dengan indikator cakupan layanan administrasi kepegawaian sebesar 98.41%; kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan indikator cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur; Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator jasa penunjang kinerja aparatur sebesar 71.54%; Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan indikator barang milik daerah yang terpelihara sebesar 73.42%.
2. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dengan indikator pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan realisasi capaian kinerja sebesar 0%.

II. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota, sub kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah kabupaten/kota; kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota, sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karir PPNS.
2. Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, kegiatan pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pemadaman pengendaliankebakaran dalam daerah kabupaten/kota.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.

III. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah/Kota, sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli,

pengaman dan pengawalan dengan indikator jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan target 53 kasus dan realisasi capaian kinerja sebesar 256 kasus.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran, Kegiatan Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan indikator jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadamn kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan target 283 laporan sedangkan sekarang sudah sampai 297 laporan kejadian kebakaran.

IV.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

Faktor-faktor tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan. Faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan yaitu karena :

- a. Perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kas sehingga target kinerja tercapai dengan baik.
- b. Semangat yang tinggi dan loyalitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat

baik.

c. Penyelesaian hukum terhadap para pelanggar peraturan daerah/peraturan bupati dengan mengedepankan mediasi dan persuasif untuk menciptakan Satpol PP yang humanis.

d. Adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Sedangkan penyebab tidak terpenuhinya pencapaian target kinerja program/kegiatan Perangkat Daerah, antara lain karena:

a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan.

b. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Masih kurangnya perjalanan dinas untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi tingkat pusat untuk meningkatkan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Belum optimalnya dukungan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba dalam penegakan perda yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Tidak sesuainya harga yang tercantum dalam e-SSH Kabupaten Toba dengan harga riil di pasaran.

V. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Dengan adanya capaian Program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan bisa tercapai dengan baik.

VI. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mutu dari SDM.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana administrasi perkantoran, operasional kantor, dan operasional lapangan untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta non kebakaran.
- c. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh PPNS dan fungsional penegakan peraturan hukum terkait lainnya.
- d. Mendukung dan memfasilitasi kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran bagi masyarakat melalui kegiatan edukasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran dan non kebakaran.
- e. Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.
- f. Optimalisasi pos jaga yang sudah ada.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d.

Tahun 2023 (Tahun berjalan) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standard Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dituangkan pada tabel pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. (Terlampir pada Tabel T-C.30).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir perlu diperhitungkan berbagai faktor penghambat/kendala yang mungkin dihadapi serta disusun dari faktor kunci keberhasilan sehingga tujuan dan sasaran yang hendak dicapai benar-benar telah melalui analisis yang matang.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategis pelaksanaan tugas-tugas, perlu pengenalan dan pemahaman terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sebagai berikut :

A. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal dilaksanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai

aspek yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sebagai berikut :

1. Kekuatan

1. Adanya Struktur Organisasi.
2. Adanya Tupoksi yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Tersedianya Satuan Tugas (Satgas) Satuan Polisi Pamong Praja
4. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Toba.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja

2. Kelemahan

1. Sarana dan prasarana belum memenuhi standar sarana dan prasarana minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran, seperti :
 - o Fasilitas gedung kantor yaitu belum tersedianya ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan, ruang penyimpanan barang/gudang, ruang sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), ruang sidang majelis kode etik, bangunan sektor pemadam kebakaran, bangunan wilayah pemadam kebakaran, bangunan perbengkelan, bangunan asrama.
 - o Kendaraan operasional yaitu jumlah mobil patroli

- yang tersedia hanya 1 unit dengan jumlah kebutuhan sebanyak 4 unit, mobil dalmas tersedia 1 unit dengan jumlah kebutuhan sebanyak 2 unit, sepeda motor tersedia 4 unit dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 unit, mobil pompa pengangkutan air dan foam beserta kelengkapannya (selang, koping, dan nozel) tersedia 6 unit dengan jumlah kebutuhan sebanyak 10 unit, serta belum tersedianya mobil tangki air (*water supply*) beserta kelengkapannya, mobil penyelamatan/rescue, mobil ambulance, dan mobil pemadam kebakaran hidrolik (snorkel).
- o Perlengkapan operasional yaitu jumlah ketersediaan peralatan dalmas (tameng, sepatu bot, pentungan) hanya 20 set dengan jumlah kebutuhan sebanyak 250 set, jaket tahan panas tersedia sebanyak 20 set dengan jumlah kebutuhan sebanyak 60 set, serta belum tersedianya peralatan pendobrak (kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader), peralatan pemadam (pompa jinjing dan kelengkapannya), peralatan ventilasi (blower jinjing dan kelengkapannya), jaket tahan api, dan handy talky (HT).
2. Jumlah personil untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya dalam hal penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara efektif dan efisien belum maksimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka jumlah kebutuhan mutu minimal layanan trantibum yaitu jumlah personil Satpol PP untuk wilayah kabupaten toba minimal sebanyak 250 orang, jumlah PPNS sebanyak 4 orang dan jumlah Satlinmas desa/kelurahan sebanyak 2440 orang. Sedangkan ketersediaan jumlah personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sebanyak 184 orang, PPNS sebanyak 3 orang, dan satlinmas desa/kelurahan belum terbentuk.

3. Permasalahan

1. Kurangnya anggaran dalam mendukung program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran seperti pengadaan kendaraan operasional, pemenuhan kebutuhan jumlah personil, serta peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan dan pelatihan teknis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan patroli, pengamanan dan pengawalan pejabat daerah/negara, pembinaan dan penyuluhan, serta penyelamatan dan penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran.
2. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan

- Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran kebutuhan sarana dan prasarana minimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.
3. Terbatasnya kemampuan SDM aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai dengan jabatan dan beban tugas yang akan dikerjakan mengakibatkan lambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan pembinaan teknis operasional kepada SDM Satpol PP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Belum terbentuknya Satlinmas disetiap desa/kelurahan disebabkan oleh belum ada peraturan kepada daerah tentang pembentukan satlinmas di desa/kelurahan Kabupaten Toba sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
 5. Masih ada Tenaga Rekrutan / Honor yang memiliki persyaratan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, misalnya masih ada Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang memiliki tinggi badan di bawah 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan serta masih banyak SDM Satpol PP yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Polisi Pamong Praja. Beberapa persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat, tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan, berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, sehat jasmani dan rohani, lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. tinggi badan di bawah 160 cm dan usia diatas 35 tahun.

6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kerja diantaranya mobiler dan komputer PC.

7. Tidak adanya pembinaan teknis operasional oleh kepala daerah kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan sehingga keterampilan SDM masih lemah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, pembinaan teknis operasional dilaksanakan melalui kegiatan :

- o Pembinaan etika profesi;
- o Koordinasi Satpol PP;
- o Pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
- o Manajemen penegakan Perda dan Perkada;
- o Peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
- o Peningkatan kapasitas kelembagaan.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal perlu dilaksanakan untuk mendapatkan aspek diluar Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Toba yang berpengaruh didalam penyelenggaraan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. Dengan melaksanakan analisis keadaan eksternal akan diketahui peluang dan ancaman yang dihadapi dan akan berpengaruh dalam mencapai kinerja yang optimal berbagai hasil analisis lingkungan eksternal lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang sudah teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Peluang

1. Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang sudah mencapai Eselon II.
2. Adanya Produk hukum daerah yang menjamin pelaksanaan tugas- tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam pelaksanaan operasi lapangan.
3. Terbukanya akses kerjasama terpadu antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dengan instansi baik vertikal maupun horizontal untuk peningkatan penyelenggaraan tugas;

2. Tantangan yang dihadapi

1. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satuan Polisi PAmong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran informasi razia yang masih ada; jumlah

PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan.

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah sehingga menimbulkan gesekan-gesekan antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat optimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, bahwa perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif.

4. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal

Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan serta pelatihan aparatur masih terbatas. Kemudian belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Akhir, maka diperlukan review terhadap rancangan awal RKPD agar terwujudnya keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan sehingga pembangunan daerah dapat terwujud. Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Toba Tahun 2024 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat akan melaksanakan misi ketujuh, yaitu: “Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban” dengan tujuan yaitu: “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban” dan sasaran yaitu: “Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman dalam Kehidupan Bermasyarakat”. Kemudian menjalankan dua program kerja diantaranya “Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum” dengan kondisi awal RPJMD sebesar 85% dan “Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran” dengan kondisi awal RPJMD sebesar 100%. Secara spesifik perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31 (*terlampir*).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun dari LSM, asosiasi-asosiasi, Perguruan tinggi, ataupun dari Perangkat Daerah yang ditujukan langsung kepada Dinas PMDP dan PA dan dari hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten tidak ada atau masih NIHIL.

Tabel TC-3.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Toba

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L

BAB. III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba disusun tetap mengarah kepada dukungan mewujudkan visi dan misi Presiden RI 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMN 2021-2026 yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong serta memiliki korelasi yang tepat dengan Misi Bupati Kabupaten Toba yaitu **“Menciptakan Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban”**. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat beserta penanggulangan kebakaran dengan sasaran meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat dan meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran. Kebijakan ini mengarah dalam bentuk penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga terwujud Toba Unggul dan Bersinar.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

TUJUAN :

- ❖ Terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

SASARAN :

- ❖ Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum.
- ❖ Meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Tujuan dan Sasaran Renja 2024 di ambil dari tujuan dan

sasaran Renstra Satpol PP tahun 2021-2026, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba 2023- 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan Indikator	Kondisi Awal	2023	2024
Terwujudnya Keamanan, Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan masyarakat serta peanggulangan kebakaran		Presentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan	%	85	88	90
	Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100
	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	20	20	20

3.3. Program dan Kegiatan

I. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Ada beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 adalah :

1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) dengan indikator: “Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara”.

2. Visi Bupati Kabupaten Toba, yakni “Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar” dengan focus pada pencapaian misi ketujuh, yaitu “Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban” dengan program dan kegiatan yang strategis dan relevan.
3. Permasalahan dan isu-isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, seperti masih tingginya pelanggaran izin mendirikan bangunan, izin pertambangan, unjuk rasa, belum terbentuknya Satlinmas desa/kelurahan untuk meminimalisir gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (narkoba, prostitusi, dan permasalahan sosial lainnya).

II. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah menetapkan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Program-program tersebut di atas, dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba pada tahun 2024 berjumlah 11 kegiatan dengan subkegiatan yang menurut sifat penyebarannya sesuai dengan fokus pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan.

Anggaran yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tujuan dan fokus penyebarannya sebesar **Rp. 10.078.574.479,- (Sepuluh Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).**

III. Rumusan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2024.

IV. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan uraian indikator output kegiatan, pagu anggaran, lokasi pelaksanaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 dijelaskan pada Tabel TC 3.3.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Sumber pendanaan tidak hanya berasal dari APBD, namun perlu ditunjang dari sumber pendanaan lain diantaranya pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan keterlibatan swasta, perbankan (skim kredit dan kredit komersial) serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan internasional. Dukungan pendanaan dibutuhkan untuk memfasilitasi proses koordinasi, supervise, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan. Rumusan program. Kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2024 ini meliputi 3 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Program pertama adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum rencana anggaran sebesar Rp. 10.078.574.479,- dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 1.360.000.000,- dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketrriban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan

Pengawasan. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- dan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Kota dengan anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS.

Program kedua adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 525.000.000,- dan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran, dan Sub Kegiatan Pengadaan Saran dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp. 52.500.000,- dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.

Program ketiga adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 6.473.420.000,-. Kegiatan yang direncanakan pada program ini yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.

2.162.460.000,- yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 624.200.000,- yang terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.270.500.000,- dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 325.260.000,- yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Total rencana anggaran pada Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 sebesar Rp.

10.078.574.479,- (Tabel TC. 33).

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Toba dari berbagai jenis gangguan. Namun, saat ini terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dalam memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses masyarakat dalam penyampaian pengaduan terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dalam membantu ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Satpol PP Kabupaten Toba membuat sebuah media atau wadah untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan keluhan ataupun aduan terkait adanya gangguan keamanan dan ketertiban umum dilingkungannya yaitu G-Form Aduan Trantibum LA-PO (LAPOR POL PP). Adapun rencana pendanaan untuk pelaksanaan inovasi di Satpol PP Kabupaten Toba ditampung dalam Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Toba berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Adapun rencana pendanaan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditampung pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia, dan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 adalah terwujudnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran. Sedangkan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, meningkatnya pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Indikator tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba adalah sebagai berikut :

1. Persentase Gangguan Trantubum yang dapat diselesaikan.
2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.
3. Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) perDesa.

4. Tingkat Waktu Tanggap Darurat (*Response Time Rate*)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TOBA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						10.078.574.479,00								10.073.996.661,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.650.000.000,00							2.664.278.125,00		
1.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3</i>	-			90 Persen	2.125.000.000,00						-	2.014.278.125,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten</i>	-			100 Persen	1.360.000.000,00			-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	1.399.278.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum															
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				1 Dokumen	600.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia															
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				2.310 Orang	110.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.278.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan															
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				51 laporan	650.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		680.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	-			100 Persen	600.000.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	40.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				4 Laporan	560.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		560.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PPNS	-			6 Orang	165.000.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	165.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	-			100 Persen	525.000.000,00						-	650.000.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-			100 Persen	525.000.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				57 Laporan	525.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	-	-						7.428.574.479,00							7.409.718.536,00	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				18 Orang	291.537.500,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		307.364.374,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				10 Unit	611.116.979,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		571.672.828,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	52.500.000,00			-	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	52.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.473.420.000,00						-	6.475.556.334,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.162.460.000,00			-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	2.162.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.136.960.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		2.136.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Memelihara Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	624.200.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	624.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	10.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	624.200.000,00			-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	624.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	4.200.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		4.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	345.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	16.000.000,00			-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.270.500.000,00			-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi 4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	3.270.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi 4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	325.260.000,00			-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi 4. Penin- atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	397.896.334,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.050.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		94.577.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.160.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		3.318.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16.520.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	80.030.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	200.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkata n Pelaksan aan Reformasi Birokrasi 4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
-		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	75.000.000,00	- Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
JUMLAH								10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2024.

Penyusunan Renja Tahun 2024 merupakan proses penentuan prioritas program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tupoksi Satpol PP dan visi dan misi Kabupaten Toba.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Balige, 05 Juli 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA**


HARIANTO H. BUTAR BUTAR, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19780118 200502 1 001

L A M P I R A N

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pencapaian RPJMD s/d Tahun 2023 Kabupaten Toba

Kode	Uraian/Bidang Uraian Penerimaan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Satuan Indikator	Target Capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Revisi) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
				5		6		7		8		9 = (8/7)		10 = (6-8)		11 = (10/5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	05	02																
		Program Peningkatan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	95,00	9.192.984.631,00	90,06	2.946.088.228,00	88,00	1.622.750.000,00	32,62	3.307.454.304,00	37,06%	203,82%	24,53	6.253.542.532,00	25,83%	68,03%
1	05	02	2.01															
		Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah / Kota	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan keterlibatan umum dalam kabupaten	Persen	100,00	6.399.364.140,00	70,18	2.537.112.771,00	88,00	1.292.750.000,00	11,19	3.242.879.570,00	12,72%	250,85%	16,27	5.779.992.341,00	16,27%	90,32%
1	05	02	2.02															
		Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penetapan Perda	Persen	100,00	2.560.520.491,00	100,00	402.160.757,00	100,00	300.000.000,00	100,00	64.574.734,00	100,00%	21,52%	40,00	466.735.491,00	40,00%	18,23%
1	05	02	2.03															
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PPNS	Orang	5,00	233.100.000,00	100,00	6.814.700,00	3,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00	6.814.700,00	2000,00%	2,92%
1	05	04																
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	7.171.854.790,00	100,00	716.398.620,00	100,00	1.033.718.551,00	4,91	129.460.615,00	4,91%	12,52%	20,98	845.859.235,00	20,98%	11,79%
1	05	04	2.01															
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten Kota	Cakupan Pelayanan Rencana Kebakaran	Persen	100,00	6.936.348.540,00	100,00	696.398.620,00	100,00	983.718.551,00	9,82	129.460.615,00	9,82%	13,16%	21,96	825.859.235,00	21,96%	11,91%
1	05	04	2.01															
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	kecamatan	16,00	235.506.250,00	16,00	20.000.000,00	16,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16,00	20.000.000,00	100,00%	8,49%
1	05	01																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah	Persen	100,00	35.772.713.311,00	100,00	7.826.333.989,00	100,00	7.793.434.148,00	22,41	2.705.291.839,00	22,41%	34,71%	24,48	10.531.625.828,00	24,48%	29,44%
1	05	01	2.01															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	100,00	99.339.225,00	100,00	20.000.000,00	100,00	21.000.000,00	20,83	7.544.000,00	20,83%	35,92%	24,17	27.544.000,00	24,17%	27,73%
1	05	01	2.02															
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	100,00	18.470.983.464,00	100,00	4.192.230.958,00	100,00	4.401.842.506,00	50,00	1.352.459.132,00	50,00%	30,72%	30,00	5.544.690.090,00	30,00%	30,02%
1	05	01	2.05															
		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	cakupan layanan administrasi kepegawaian	Persen	100,00	407.228.773,00	0,00	0,00	100,00	168.948.330,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	05	01	2.06															
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	100,00	2.125.373.719,00	100,00	528.043.031,00	100,00	42.295.182,00	21,43	13.841.176,00	21,43%	32,73%	24,29	541.884.207,00	24,29%	25,50%
1	05	01	2.08															
		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	100,00	10.911.300.000,00	100,00	2.221.960.000,00	100,00	2.161.960.000,00	50,00	1.238.542.210,00	50,00%	57,29%	30,00	3.460.502.210,00	30,00%	31,71%
1	05	01	2.09															
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	100,00	2.931.105.000,00	100,00	514.100.000,00	100,00	564.305.000,00	14,58	92.905.321,00	14,58%	16,46%	22,92	607.005.321,00	22,92%	20,71%
TOTAL						52.137.552.732,00				10.449.902.699,00		6.142.286.758,00	21,46%	83,68%		17.631.827.595,00	23,76%	36,42%

Disusun
Balige, Tanggal Juni 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA**



**HARIANTO H. BUTARUTAR, SE., M.Si
PEMBINA
NIP. 19780118 200502 1 001**

Tabel TC-3.0
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA

NO	Indikator	SPM / STANDAR	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan Analisis
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	Persentase gangguan trantibun yang dapat diselesaikan			86%	88%	90%	93%	100%	100%	90%	93%	Tercapai
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			26%	29%	32%	35%	26%	44.44%	32%	35%	Tercapai
3	Waktu tanggap (response time rate) penanganan kebakaran			20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	Tercapai

Tabel TC 3. 1

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
9	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah	100%	6.473.420.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah	100%	6.473.420.000
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	presentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	16.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	presentase capaian kinerja perangkat daerah	100%	16.000.000

1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	10.000.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan	6.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.270.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%	3.270.500.000
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	47 Orang/bulan	3.270.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	47 Orang/bulan	3.270.500.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	325.260.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	325.260.000
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.500.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	23.050.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	23.050.000
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.160.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Satpol PP	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.160.000

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	4 paket	16.520.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	4 paket	16.520.000
1	05	01	2.06	09	Fasilitas kunjungan tamu	Satpol PP	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	80.030.000	Fasilitas kunjungan tamu	Satpol PP	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 laporan	80.030.000
1	05	01	2.06	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	200.000.000
1	05	01	2.06	09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	75.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	100%	75.000.000
1	05	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	75.000.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	3 unit	75.000.000
	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	2.162.460.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	2.162.460.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	25.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	25.500.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.136.960.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.136.960.000

1	05	01	2.09	28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	624.200.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	624.200.000
1	05	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	75.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 Unit	75.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	345.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	345.000.000
1	05	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	4.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Satpol PP	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	4.200.000
9	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	200.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	200.000.000
1	05	01	2.09	06	Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88%	2.125.000.000	Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88%	2.125.000.000

1	05	02			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	100%	1.360.000.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	100%	1.360.000.000
1	05	02	2.01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli pengamanan dan pengawasan	51 kasus	650.000.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli pengamanan dan pengamalan	51 kasus	650.000.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 dokumen	600.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	1 dokumen	600.000.000
	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 orang	110.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	2.310 orang	110.000.000

1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Persentase Penegakan Perda	100%	600.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Persentase Penegakan Perda	100%	600.000.000
1	5	2	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	7 laporan	40.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat / kelompok masyarakat / pelaku usaha	7 laporan	40.000.000
1	5	2	2.02	03	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditandatangani sesuai SOP	4 laporan	560.000.000	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditandatangani sesuai SOP	4 laporan	560.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satpol PP	Pembinaan PPNS	4 orang	165.000.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satpol PP	Pembinaan PPNS	4 orang	165.000.000
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 laporan	165.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	1 laporan	165.000.000

						serta penegakan perda dan perkada					serta penegakan perda dan perkada			
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Persentase Kasus Kebakaran yang Tertangani	100%	1.480.154.479	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP	Persentase Kasus Kebakaran yang Tertangani	100%	1.480.154.479
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	1.427.654.479	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%	1.427.654.479
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	57 Laporan	525.000.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	57 Laporan	525.000.000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	10 unit	611.116.979	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PP	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	10 unit	611.116.979

1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dalam penanggulangan kebakaran	55 orang	291.537.500	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Satpol PP	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dalam penanggulangan kebakaran	55 orang	291.537.500
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satpol PP	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	16 kecamatan	52.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Satpol PP	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	16 kecamatan	52.500.000
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	50 orang	52.500.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Satpol PP	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	50 orang	52.500.000
Jumlah										10.078.574.479				10.078.574.479

TABEL TC- 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan indikator	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	10	11	8	9	10	11
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah	Persen	Satpol PP	100	6.473.420.000	DAU		100	6.475.556.334
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase capaian kinerja perangkat daerah	Persen	Satpol PP	100	16.000.000	DAU		100	20.000.000
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Satpol PP	3	10.000.000	DAU		3	10.000.000
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	Satpol PP	6	6.000.000	DAU		6	10.000.000
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	Persen	Satpol PP	100	3.270.500.000	DAU		100	3.270.500.000
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	Satpol PP	47	3.270.500.000	DAU		47	3.270.500.000

1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Persen	Satpol PP	100	325.260.000	DAU		100	397.896.334
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	Satpol PP	4	2.500.000	DAU		4	3.000.000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	Satpol PP	4	23.050.000	DAU		4	94.577.760
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	Satpol PP	4	3.160.000	DAU		4	3.318.574
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	Satpol PP	4	16.520.000	DAU		4	17.000.000
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	Satpol PP	12	80.030.000	DAU		12	80.000.000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	Satpol PP	500	200.000.000	DAU		500	200.000.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur	Persen	Satpol PP	100	75.000.000	DAU		-	-
1	05	01	2.08	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	Satpol PP	3	75.000.000	DAU		-	-
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	Persen	Satpol PP	100	2.162.460.000	DAU		100	2.162.960.000
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	Satpol PP	12	25.500.000	DAU		12	26.000.000

1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	Satpol PP	12	2.136.960.000	DAU		12	2.136.960.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	Persen	Satpol PP	100	624.200.000	DAU		100	624.200.000
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	Satpol PP	6	75.000.000	DAU		6	75.000.000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit	Satpol PP	8	345.000.000	DAU		8	345.000.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	Satpol PP	12	4.200.000	DAU		12	4.200.000
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	Satpol PP	1	200.000.000	DAU		1	200.000.000
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Persen	Satpol PP	90	2.125.000.000	DAU		90	2.014.278.125
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	Persen	Satpol PP	100	1.360.000.000	DAU		100	1.399.278.125

1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan, patroli pengamanan dan pengamalan	Kasus	Satpol PP	51	650.000.000	DAU		51	680.000.000
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	Satpol PP	1	600.000.000	DAU		1	600.000.000
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Satpol PP	140	110.000.000	DAU		2.130	119.278.125
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	Persen	Satpol PP	100	600.000.000	DAU		100	600.000.000
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha	Laporan	Satpol PP	4	40.000.000	DAU		4	40.000.000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditandatangani sesuai SOP	Laporan	Satpol PP	4	560.000.000	DAU		4	560.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan PPNS	Orang	Satpol PP	4	165.000.000	DAU		4	15.000.000

1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Laporan	Satpol PP	1	165.000.000	DAU	1	15.000.000
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	Satpol PP	100	1.480.154.479	DAU	100	1.584.162.202
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Persen	Satpol PP	100	1.427.654.479	DAU	100	1.529.037.202
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Laporan	Satpol PP	57	525.000.000	DAU	57	650.000.000
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	unit	Satpol PP	10	611.116.979	DAU	10	571.672.828
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dalam penanggulangan kebakaran	Orang	Satpol PP	55	291.537.500	DAU	55	307.364.374

1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	kecamatan	Satpol PP	16	52.500.000			16	55.125.000
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	Orang	Satpol PP	50	52.500.000	DAU		50	55.125.000
Total										10.078.574.479				10.073.996.661

TABEL TC.33 A
PRGOGRAM KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja						Pagu indikatif tahun 2024	Perkiraan maju tahun 2025	Sumber Dana	OPD Penanggungjawab	Jenis kegiatan
								Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan						
								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif	Meningkatnya Ketertiban dan Ketertaman Dalam kehidupan											
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah	100%					6.473.420.000	6.475.556.334	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					presentase capaian kinerja perangkat daerah	100%			16.000.000	20.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan							dokumen perencanaan perangkat	3 dokumen	10.000.000	10.000.000	DAU	Satpol PP	1

					Perangkat Daerah						daerah							
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 laporan	6.000.000	10.000.000	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100%		3.270.500.000	3.270.500.000	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	47 orang/bulan	3.270.500.000	3.270.500.000	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%		325.260.000	397.896.334	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	2.500.000	3.000.000	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	23.050.000	94.577.760	DAU	Satpol PP	1	

1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	3.160.000	3.318.574	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan	4 paket	16.520.000	17.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu						jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	80.030.000	80.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	200.000.000	200.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Kinerja Aparatur			75.000.000	-	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.08	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan						Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	75.000.000	-	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jasa Penunjang Kinerja Aparatur			2.162.460.000	2.162.960.000	DAU	Satpol PP	1

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	25.500.000	26.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.136.960.000	2.136.960.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%		624.200.000	624.200.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6 unit	75.000.000	75.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan , Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	8 unit	345.000.000	345.000.000			1

											Perijinannya							
1	05	01	2.09	01	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 unit	4.200.000	4.200.000	DAU	Satpol PP	1	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi yang dipelihara		200.000.000	200.000.000			1	
1	05	02			Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	88%				2.125.000.000	2.014.278.125	DAU	Satpol PP	1	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	100%		1.360.000.000	1.399.278.125	DAU	Satpol PP	1	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam						Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah	50 kasus	650.000.000	680.000.000	DAU	Satpol PP	1	

					anan dan Pengawasan						dini , pembinaan dan penyuluhan , pelaksanaan , patroli pengamanan dan pengamalan						
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah dokumen yang memuat yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	600.000.000	600.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	140 Orang	110.000.000	119.278.125	DAU	Satpol PP	1
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					Persentase Penegakan Perda	100%		600.000.000	600.000.000	DAU	Satpol PP	1

1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	4 laporan	40.000.000	40.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditandatangani sesuai SOP	4 Laporan	560.000.000	560.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					Pembinaan PPNS	4 orang		165.000.000	15.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan	4 laporan	165.000.000	15.000.000	DAU	Satpol PP	1

											perkada						
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%				1.480.154.479	1.584.162.202	DAU	Satpol PP	1
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100%				1.427.654.479	1.529.037.202	DAU	Satpol PP	1

1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	56 Laporan	525.000.000	650.000.000	DAU	Satpol PP	1
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	10 unit	611.116.979	571.672.828	DAU	Satpol PP	1
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2 orang	291.537.500	307.364.374	DAU	Satpol PP	1
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	16 kecamatan		52.500.000	55.125.000	DAU	Satpol PP	1

1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanganan kebakaran setiap tahunnya	50 orang	52.500.000	55.125.000	DAU	Satpol PP	1
											Total		10.078.574.479	10.073.996.661			

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. TOBA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen			100 Persen 100 Persen 1 ok	6.473.420.000,00						100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	6.475.556.334,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian kinerja perangkat daerah</i>	100 persen			100 Persen	16.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100 persen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	6.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penin atan Tatakelola Pemerintah an dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 Persen			100 Persen	3.270.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100 Persen	3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	3.270.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja		3.270.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen			100 Persen	325.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP	100 Persen	397.896.334,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.050.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		94.577.760,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	3.160.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		3.318.574,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	16.520.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	80.030.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur</i>	100 Persen			100 Persen	75.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP	100 Persen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				3 Unit	75.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jasa Penunjang Kinerja Aparatur</i>	100 Persen			100 Persen	2.162.460.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP	100 Persen	2.162.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	25.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	2.136.960.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Satuan Pol PP		2.136.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 Persen			100 Persen	624.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP	100 Persen	624.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				6 Unit	75.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya</i>				12 Unit	345.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP		345.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	4.200.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP		4.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	200.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Satuan Pol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	95 Persen			90 Persen	2.125.000.000,00						95 Persen	2.014.278.125,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten	100 Persen			100 Persen	1.360.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba	100 Persen	1.399.278.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2.310 Orang	110.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Masyarakat Kabupaten Toba		119.278.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				51 laporan	650.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		680.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	100 Persen			100 Persen	600.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba	100 Persen	600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				4 Laporan	560.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		560.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Pembinaan PPNS</i>	5 Orang			4 Orang	165.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Pol PP	5 Orang	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda</i>				1 Laporan	165.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Aparatur Pol PP		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</i>	100 Persen			100 Persen	1.480.154.479,00						100 Persen	1.584.162.202,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan pelayanan bencana kebakaran</i>	100 Persen			100 Persen	1.427.654.479,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba	100 Persen	1.529.037.202,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				57 Laporan	525.000.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peninatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>				18 Orang	291.537.500,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		307.364.374,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri															
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>				10 Unit	611.116.979,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat Kabupaten Toba		571.672.828,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	<i>Pemberdayaan masyarakat di kecamatan</i>	16 kecamatan			16 kecamatan	52.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat	16 kecamatan	55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat															
			<i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i>				50 Orang	52.500.000,00	Kab. Toba, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Penintatan Tatakelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.	Masyarakat		55.125.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		J U M L A H							10.078.574.479,00							10.073.996.661,00	